

ABSTRAK

FAJAR BESTARA SINAGA, NIM: 1900874201225 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) SECARA SEPIHAK DAN TANPA MEMPERHATIKAN HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PDT.SUS-PHI/2022/PN.JMB)

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa memperhatikan hak-haknya, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JMB. Permasalahan utama yang diteliti adalah faktor penyebab terjadinya PHK sepihak serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen putusan, dan literatur yang relevan untuk menganalisis fakta hukum yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat diduga melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023. Namun, dalam proses persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan PHK tidak sah dan Para Penggugat berhak atas hak-hak normatif sesuai Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hakim kemudian mengabulkan sebagian gugatan, dengan nilai hak yang dikabulkan sebesar Rp177.030.000 dari total tuntutan Rp368.640.000.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa PHK sepihak tanpa pemenuhan hak normatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengusaha wajib memperhatikan hak pekerja dalam setiap tindakan pemutusan hubungan kerja agar tidak merugikan tenaga kerja dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hak Normatif Pekerja, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

ABSTRACT

FAJAR BESTARA SINAGA, NIM: 1900874201225 A JURIDICAL REVIEW OF WORKERS WHO EXPERIENCED UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT (PHK) WITHOUT REGARD TO THEIR RIGHTS (CASE STUDY OF DECISION NO. 19/PDT.SUS-PHI/2022/PN.JMB)

This study discusses the juridical review of workers who experienced unilateral termination of employment (PHK) without considering their rights, with a case study of the Industrial Relations Court Decision Number 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JMB. The main problems examined are the factors causing unilateral termination and the judge's legal considerations in deciding the case.

The research method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach, which analyzes statutory regulations, court decisions, and relevant literature to examine the legal facts that occurred.

The results of the study show that the termination was carried out by the Defendant on the grounds that the Plaintiffs were alleged to have committed urgent violations as regulated in the Company Regulations of 2021–2023. However, during the trial the Defendant could not prove this claim, so the panel of judges declared the termination invalid and ruled that the Plaintiffs were entitled to their normative rights in accordance with Article 40 and Article 43 of Government Regulation Number 35 of 2021. The judge then partially granted the lawsuit, with the rights granted amounting to Rp177,030,000 out of a total claim of Rp368,640,000.

The conclusion of this study emphasizes that unilateral termination of employment without fulfilling normative rights contradicts labor law provisions. Therefore, employers are obliged to respect workers' rights in every termination process to avoid harming workers and to comply with the principles of justice.

Keywords: Juridical Review, Termination of Employment, Workers' Normative Rights, Industrial Relations Court Decision.